



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : ASISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASEP SAEPUDIN MUSTOPA**
2. Jabatan : **ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**
3. NHK : **509400**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.505.000.000

1. Tanah Seluas 2548 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1981 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. Tanah Seluas 2724 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G DIESEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 287.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 45.360.697**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	3.277.360.697
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.277.360.697

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.